

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan merupakan proses dalam melakukan perubahan pada indikator ekonomi maupun sosial menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan (Todaro, 2009). Untuk melihat suatu pembangunan dapat dikatakan berjalan dengan baik bisa dilihat dari Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia memiliki peran penting dari terciptanya sebuah pembangunan. Yaitu pembangunan yang bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan dapat menjalankan kehidupan yang produktif. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya manusia harus dapat berkembang dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. (Maharany, 2012).

Tujuan utama dari pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah keinginan yang hendak dicapai oleh masyarakat dalam kehidupannya. Kesejahteraan bisa diartikan sebagai kepuasan yang diterima oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Seperti kebutuhan primer yaitu pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan lain yang mendukung masyarakat itu dapat dikatakan sejahtera. Jika kebutuhan primer dapat terpenuhi, maka kebutuhan lain akan juga didapatkan dan bisa membuat masyarakat itu sejahtera.

Untuk melihat dan mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja dalam hal pembangunan dan kesejahteraan manusia, *United Nations For Development Program* (UNDP, 1996) telah menerbitkan satu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), Indeks Pembangunan manusia adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kesejahteraan manusia yang sudah dilakukan di suatu negara (Soepono, 1999).

Kualitas pembangunan manusia dapat diukur melalui 3 komponen, yaitu : (1) keberhasilan dalam kesehatannya yang dilihat dari angka harapan hidup, (2) keberhasilan dalam pendidikan yang dilihat dari angka melek huruf, (3) keberhasilan yang dilihat dari daya beli masyarakat. Jika ketiga komponen diatas dapat dipenuhi oleh suatu negara, maka dapat dikatakan kualitas pembangunan manusia di negara tersebut sudah berhasil dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Pulau Sumatera terdiri dari 10 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau. Dari 10 Provinsi tersebut nilai indeks pembangunan yang paling tinggi pada tahun 2017 adalah Kepulauan Riau yaitu sebesar 74.45%, selanjutnya adalah Riau yaitu sebesar 71.79%, dan di susul oleh Sumatera Barat 71.24%. Provinsi Riau memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi setelah Kepulauan Riau. Tinggi atau rendah nya indeks pembangunan manusia mencerminkan pemerataan pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Dilihat dari jumlah penduduk miskin, Provinsi Riau lebih tinggi di bandingkan dengan Kepulauan Riau. Pada tahun

2017 jumlah penduduk miskin Povinsi Riau adalah sebesar 514.62 ribu jiwa dan Kepulauan Riau sebesar 128.43 ribu jiwa. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah yang serius yang dihadapi oleh negara berkembang. Kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemiskinan pernah terjadi di Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1998 (BPS, 2009). Jika pendapatan yang diterima sedikit maka dapat dikatakan seseorang memiliki standar hidup yang rendah, kondisi rumah yang tidak layak, pelayanan dan kesehatan yang buruk, serta tingkatan pendidikan masyarakat yang rendah, yang akan berdampak pada sumber daya manusia yang menganggur (Kuncoro, 2000).

Banyaknya jumlah penduduk miskin dapat mengakibatkan masalah atau efek cukup serius yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan di negara manapun. Karena pada dasarnya masalah banyaknya penduduk miskin adalah kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan bisa terabaikan (Adelfina, 2016). Indikator kemiskinan yang terkait dalam analisis kesejahteraan sosial meliputi jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan pendapatan perkapita (Hidayana, 2009).

Penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun 2013-2017 berfluktuasi. Yang mana pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 di Provinsi Riau terjadi

penurunan harga migas dan kelapa sawit yang sangat drastis, yang membuat tenaga kerja banyak di PHK dan semakin banyak nya pengangguran. Banyaknya pengangguran akan mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Akan tetapi pada tahun berikutnya pemerintah di Provinsi Riau sudah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dengan berbagai usaha-usaha. Kemudian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

PDRB yaitu hasil nilai bersih barang dan jasa akhir yang diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode (Kairupan, 2013). Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih menfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2001). Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari angka PDRB. PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektor/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Penghitungan PDRB bisa juga dilihat dari harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB memperlihatkan penambahan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan pada harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang menjadi dasar perhitungan. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, sedangkan PDRB atas harga berlaku menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi (BPS, 2010). Hubungan pembangunan

manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga terciptanya peningkatan pendapatan (UNDP, 1996). Diduga APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, APBD adalah anggaran biaya yang dikeluarkan dalam periode tahunan di daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. APBD adalah salah satu indikator yang berguna untuk melihat dan mengukur keberhasilan potensi perekonomian di daerah. Artinya, jika perekonomian pada suatu daerah mengalami pertumbuhan maka akan meningkat pendapatan daerah (Saragih, 2003).

Teori Peacock dan Wiseman memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara. Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka memiliki kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena (Mangkoesebroto, 2012).

Berdasarkan Teori Rostow dan Musgrave (Dumairy, 1997) mengemukakan pemikirannya tentang model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah. Teori ini berhubungan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal terdapatnya perkembangan presentase investasi dan perkembangan ekonomi terhadap total keseluruhan investasi besar. Dalam hal ini pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi.

Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang menjadi urusan pemerintah dan tugas provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (2) menyatakan bahwa anggaran pemerintah dialokasikan minimal sebesar 10 persen dari APBD diluar gaji.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang di beri judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah Sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel Jumlah Penduduk Miskin terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh variabel PDRB terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau?
3. Bagaimana pengaruh variabel APBD Kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

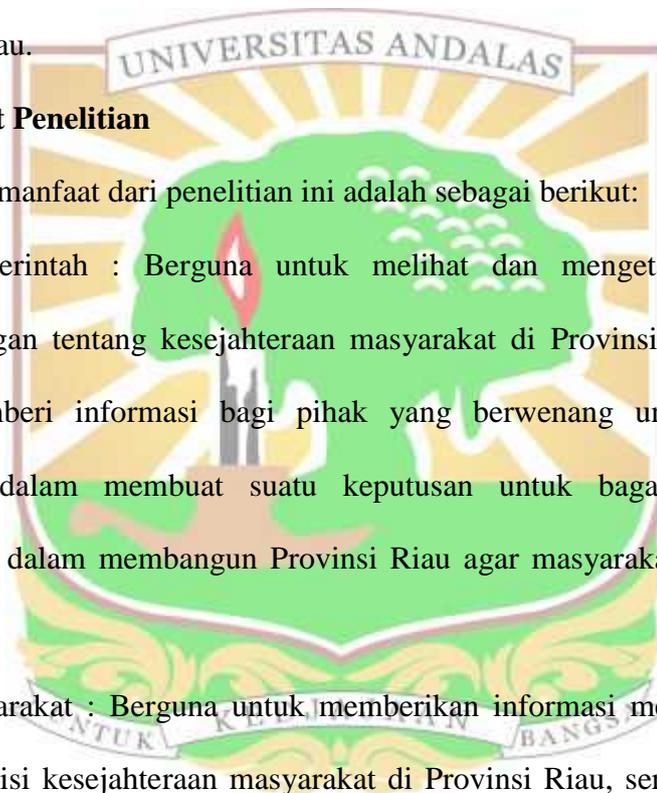
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh variabel Jumlah Penduduk Miskin terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.
3. Menganalisis variabel APBD Kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah : Berguna untuk melihat dan mengetahui bagaimana perkembangan tentang kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Sehingga dapat memberi informasi bagi pihak yang berwenang untuk mengambil kebijakan dalam membuat suatu keputusan untuk bagaimana tindakan selanjutnya dalam membangun Provinsi Riau agar masyarakatnya bisa hidup sejahtera.
2. Bagi Masyarakat : Berguna untuk memberikan informasi mengenai keadaan dimana posisi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau, serta menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih giat lagi dalam meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Riau.
3. Bagi peneliti : untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.
4. Bagi peneliti lain : untuk menambah koleksi ilmu pengetahuan bagi peneliti lain serta pedoman untuk melakukan penelitian berikutnya.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan berfokus pada tujuan yang ingin dicapai peneliti, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian di Kab/Kota di Provinsi Riau dalam kurun waktu 2013-2017. Kemudian kesejahteraan ini di ukur melalui indeks pembangunan manusia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari Bab I pendahuluan, Bab II tinjauan pustaka, Bab III Metode penelitian, Bab IV Gambar umum variabel, Bab V temuan empiris, dan Bab VI Penutup.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian , dari latar belakang yang telah diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusah masalah maka akan diperoleh tujuan penelitian kemudian dapat terdapat juga manfaat penelitian dan pada bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori landasan variabel yang akan diteliti, serta memaparkan penelitian terdahulu. Dari landasan teori maka dapat disusun kerangka penelitian konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan dijelaskan tentang variabel-variabel penelitian jenis dan sumber data, ruang lingkup penelitian dan pengelola data.

BAB IV GAMBARAN UMUM VARIABEL

Pada bab ini akan menguraikan deskripsi statistik dari masing-masing variabel perkembangannya.

BAB V TEMUAN EMPIRIS

Dalam bab ini memuat hasil pembahasan dari analisa data yang telah diteliti.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

